

DUKUNGAN FILIPINA TERHADAP PEMBENTUKAN PAKTA PERTAHANAN AUKUS TAHUN 2021-2023

Kheista Mardhatillah Firs¹, Sri Yuniati², Honest Dody Molasy³

^{1,2,3} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember
Jember, Jawa Timur

ABSTRAK

Pembentukan AUKUS sebagai respon terhadap pergerakan China yang semakin agresif dalam mengklaim Laut Cina Selatan menjadi perdebatan di kawasan karena diduga melanggar prinsip non-nuklir ASEAN yaitu SEANWFZ. Negara-negara anggota ASEAN cenderung keberatan dan khawatir akan terjadinya persaingan senjata nuklir di kawasan akibat pembentukan AUKUS. Terutama dengan adanya perjanjian propulsi nuklir dalam pengembangan yang dilakukan oleh AUKUS. Namun, berbeda dengan anggota ASEAN lainnya, Filipina secara terbuka mendukung AUKUS secara penuh, hal ini terbukti dengan dirilisnya pernyataan resmi oleh Menteri Luar Negeri Filipina tidak lama setelah dibentuknya AUKUS. Dalam pernyataan tersebut Filipina menyatakan bahwa negaranya dengan sangat terbuka akan mendukung penuh AUKUS di kawasan dan juga menyangkal dugaan bahwa AUKUS melanggar SEANWFZ. Menggunakan teori neorealisme dan konsep *bandwagoning* tulisan ini berargumen bahwa dukungan Filipina terhadap AUKUS merupakan respon Filipina terhadap ancaman China di Laut Cina Selatan. Klaim China yang tumpang tindih dengan ZEE Filipina menyebabkan Filipina merasa terancam. Filipina meyakini AUKUS dapat meredam pergerakan China di Laut Cina Selatan dan menjaga stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik dari ancaman China. Selain itu Filipina berpendapat bahwa ASEAN tidak memiliki kapabilitas militer yang cukup dalam menghadapi ancaman China di kawasan sehingga dibutuhkan penyeimbang yang setara dalam hal ini adalah AUKUS. Pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh AUKUS diyakini dapat menyaingi kekuatan militer China. Dengan Filipina mendukung AUKUS, Filipina dapat mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang sebelumnya telah terbentuk di masa lalu.

Kata kunci: AUKUS, Laut Cina Selatan, Filipina, Neorealisme, *Bandwagon*

ABSTRACT

The establishment of AUKUS as a response to China's aggressive movement in claiming the South China Sea has become a debate in the region because it allegedly violates ASEAN's non-nuclear principle, SEANWFZ. ASEAN member states tend to object and concern about nuclear arms competition in the region. Especially with the nuclear propulsion agreement in the development by AUKUS. Contrast to other ASEAN members, the Philippines openly supports AUKUS, as proven by the release of an official statement by the Philippine Minister of Foreign Affairs shortly after the establishment of AUKUS. In the statement, the Philippines stated that the country would fully support the AUKUS in the region and also denied allegations that the AUKUS violated the SEANWFZ. Using neorealism theory and the concept of bandwagoning, its known that the Philippines has its own reasons. The results of this study show that the Philippines' support for AUKUS is the Philippines response to the threat of China in the South China Sea. China's claims overlapping with the Philippines' EEZ caused the Philippines to feel threatened. The Philippines believes that AUKUS can reduce China's movements in the South China Sea

and maintain the security stability of the Indo-Pacific region from China's threats. In addition, the Philippines argues that ASEAN doesn't have sufficient military capabilities in dealing with China's so that an equal balance is needed in this case is AUKUS. With the Philippines supporting AUKUS, the Philippines can also strengthen relations with the United States, Australia and the United Kingdom.

Keywords: AUKUS, South China Sea, Philippines, Neorealism, Bandwagon

1. PENDAHULUAN

Persaingan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik telah menjadi isu global yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir ⁽¹⁾. China, dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang terus berkembang, telah menantang dominasi Amerika Serikat, yang sebelumnya lebih fokus pada Timur Tengah. Kehadiran China di kawasan Indo-Pasifik menyebabkan Amerika Serikat kembali mengalihkan perhatian dan pengaruhnya pada Indo-Pasifik setelah sebelumnya berfokus pada kawasan Timur Tengah, meningkatnya kehadiran Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik menciptakan ketegangan di kawasan meningkat ⁽²⁾. China kini termasuk dalam tiga kekuatan ekonomi terkuat di dunia ⁽³⁾. Hal tersebut menunjukkan kemampuan China untuk menjadi pesaing bagi Amerika Serikat terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu China berupaya untuk mengalahkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan salah satunya dengan mengklaim Laut Cina Selatan ⁽⁴⁾. Klaim China atas laut Cina Selatan akan memperluas jalur perdagangan bagi China dan meningkatkan sektor ekonomi China. China menggunakan strategi militer yang semakin lama semakin agresif dalam upayanya mengklaim laut Cina Selatan mulai dari mengikuti kapal nelayan Taiwan yang berada di perairan laut Cina Selatan hingga menembakkan meriam air terhadap kapal Filipina.

Sebagai respons terhadap agresivitas China, pada tahun 2021, Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membentuk pakta pertahanan trilateral yang dikenal sebagai *Australia, United Kingdom, and United States* (AUKUS). Tujuan utama dari AUKUS adalah untuk memperkuat kerjasama militer dan teknologi antara ketiga

negara, termasuk pengembangan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Namun, inisiatif ini bertentangan dengan prinsip kawasan bebas nuklir yang diusung oleh ASEAN melalui Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ), yang bertujuan untuk menjaga kawasan dari senjata nuklir ⁽⁵⁾.

Respon negara-negara ASEAN terhadap AUKUS beragam. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Indonesia, mengungkapkan keberatan mereka, khawatir bahwa AUKUS dapat meningkatkan perlombaan senjata dan ketegangan di kawasan ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾. Singapura juga memberikan tanggapan positif ⁽⁸⁾, sedangkan Vietnam memilih untuk tetap netral dan tidak ingin terlibat dalam politik kekuasaan yang berkembang ⁽⁹⁾.

Diantara respon negara anggota ASEAN, Filipina merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang menunjukkan dukungannya secara terbuka, Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin memberikan pernyataan bahwa Filipina secara terbuka dan penuh mendukung pembentukan dari Pakta Pertahanan AUKUS ⁽¹⁰⁾. Sikap Filipina ini cukup unik karena di kawasan ASEAN, Filipina merupakan satu-satunya negara yang memberikan dukungannya dengan sangat terbuka terhadap AUKUS. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apa alasan Filipina memutuskan memberikan dukungannya terhadap pembentukan AUKUS.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pemahaman secara deskriptif ⁽¹¹⁾. Penelitian ini menekankan dukungan Filipina terhadap pembentukan AUKUS untuk kawasan Indo-Pasifik di tengah dugaan bahwa AUKUS telah melanggar prinsip ASEAN yaitu SEANWFZ beserta perspektif

Filipina terhadap China sebagai negara yang menimbulkan ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber dari buku elektronik seperti jurnal-jurnal yang di-posting di internet, gambar, chart, dan lain sebagainya, dari data tersebut penulis akan mengembangkan tulisan yang sedang penulis bentuk menjadi pembahasan yang menarik.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Posisi China di kawasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik merupakan wilayah geografis yang meliputi Samudera Hindia, Pasifik Tengah, Pasifik Barat, dan Laut Cina Selatan. Istilah Indo-Pasifik telah berevolusi menjadi konsep strategis dalam bidang ekonomi, politik, dan militer global. Kawasan Indo-Pasifik memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan perdagangan internasional, menjadikannya pusat geopolitik global. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang kaya akan sumber daya alam menjadi salah satu faktor penarik bagi negara-negara di dunia untuk berinvestasi di kawasan Indo-Pasifik ⁽¹¹⁾. Kawasan Indo-Pasifik saat ini menyumbang sepertiga PDB global dan 60% pertumbuhan PDB global, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah. Hal ini menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan dengan pasar potensial ⁽¹²⁾. Kehadiran negara-negara besar dengan militer kuat seperti AS, China, Australia, Jepang, dan India menjadikan Indo-Pasifik arena persaingan kekuatan dunia, terutama antara AS dan China dalam memperebutkan dominasi di kawasan. Persaingan AS-China di Indo-Pasifik semakin memanas seiring dengan kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan politik raksasa di kawasan.

China telah mengalami pertumbuhan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan di kawasan Indo-Pasifik, kehadiran China menantang dominasi Amerika Serikat di kawasan. Secara geopolitik China merupakan negara besar yang terkurung. Hal

tersebut diakibatkan China tidak memiliki akses langsung terhadap perairan internasional sedangkan di sebelah barat, China dikelilingi oleh pegunungan yang sulit dilalui menggunakan transportasi darat maupun transportasi udara. Wilayah dari pegunungan China ini juga berbatasan langsung dengan wilayah negara Asia Timur. Di sisi lain jalur laut China juga terhalang oleh wilayah negara lain yaitu Korea Utara, Korea Selatan, Jepang dan kepulauannya, Taiwan, dan Filipina ⁽¹⁴⁾.

Terkurungnya wilayah China dari perairan Internasional menghambat aktivitas perdagangan China sehingga China berupaya untuk membuka jalur perdagangannya sendiri dengan mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Menggunakan sumber daya militernya, China meningkatkan aktivitas militer di sekitar Laut Cina Selatan menggunakan taktik abu-abu. Taktik abu-abu merupakan strategi untuk mengendalikan situasi di wilayah sengketa tanpa memancing konflik senjata secara langsung, seperti yang telah dilakukan China di Taiwan dan Laut Cina Selatan. China terus meningkatkan serta menempatkan kekuatan militernya seperti *People Liberations Army* (PLA), kapal induk, kapal selam, dan rudal, yang ditempatkan di wilayah Laut Cina Selatan sehingga mengakibatkan kewaspadaan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik serta memicu persaingan senjata di kawasan. Tidak hanya menjadi ancaman bagi kawasan Indo-Pasifik, akan tetapi militer China juga menjadi ancaman bagi Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang kemudian mendorong terbentuknya pakta pertahanan AUKUS.

3.2 Pembentukan AUKUS

AUKUS merupakan aliansi keamanan trilateral yang beranggotakan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dibentuk pada 15 September 2021, AUKUS merupakan bentuk respon terhadap pergerakan China yang agresif di wilayah Laut Cina Selatan. Tujuan dari pembentukan AUKUS sendiri adalah untuk meningkatkan keamanan serta stabilitas di kawasan Indo-pasifik

memlalui kerja sama antar tiga negara anggotanya, merujuk pada gagasan dari AUKUS sendiri "*enduring ideals, shared commitment to the international rule-based order, and resolve to deepen diplomatic security, and defense cooperation in the Indo-Pacific region*"⁽¹⁵⁾. Kemitraan AUKUS berfokus pada kerja sama militer diantaranya dalam mekanisme siber, kecerdasan buatan (AI), pengembangan teknologi kuantum, teknologi bawah laut, rudal hipersonik, pengolahan uranium, peningkatan fasilitas keamanan dan pertahanan serta memaksimalkan teknologi untuk pertahanan⁽¹⁶⁾.

Pembentukan AUKUS dilakukan sebagai upaya mengimbangi pengaruh China yang terus meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Kekhawatiran negara-negara di kawasan Indo-Pasifik serta Amerika Serikat, Australia, dan Inggris terhadap pergerakan dan dominasi China yang semakin agresif mendorong terbentuknya AUKUS. Australia menganggap China sebagai ancaman bagi negaranya, berawal dari potensi perang Taiwan yang disebabkan oleh China, pandemi COVID-19, hingga ambisi China terhadap Laut Cina Selatan. Menurut Natasha Kassam, Direktur jajak pendapat di Lowy Institute dalam wawancara bersama VOA yang dirilis pada 27 Juni 2022, Kekhawatiran Australia terhadap perang Taiwan meningkat ketika terjadinya invasi Rusia ke Ukraina⁽¹⁷⁾. Pada masa pandemi COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Australia mengeluarkan permintaan untuk penyidikan global di Wuhan. Namun permintaan tersebut dianggap sebagai kritik besar bagi China sehingga China melakukan pembatasan impor anggur dan batu bara dari Australia⁽¹⁷⁾. Selain itu dengan ambisi China dalam mengklaim wilayah Laut Cina Selatan memperkeruh konflik antara Australia dan China, dikarenakan Australia menganggap Indo-Pasifik merupakan wilayah yang termasuk lingkup pengaruh Australia.

Selain Australia, Amerika Serikat juga menganggap China sebagai ancaman terutama dalam perebutan hegemoni di kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo, dalam pidatonya pada 30 November 2022 di Institut Teknologi Massachusetts, mengatakan China merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dalam bidang keamanan nasional. Menurut Gina Raimondo hal yang paling mengganggu dari China adalah upaya China dalam mempermainkan sistem global dengan menempatkan perwakilan-perwakilan China di badan-badan penetapan standar teknologi internasional untuk menyebarkan nilai-nilai negara dan menyebarkan pengaruh. Gina Raimondo menegaskan kembali bahwa China terus membawa serangkaian tantangan yang semakin besar terhadap keamanan nasional Amerika Serikat (Mercer, 2022). Kepentingan nasional yang bertabrakan antara Amerika Serikat dan China di wilayah Laut Cina Selatan menimbulkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik yang meningkatkan potensi konflik militer.

Seperti halnya Australia dan Amerika Serikat, Inggris juga menganggap China merupakan ancaman dan tantangan besar bagi negaranya akan tetapi Inggris tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan China. Hal ini dilakukan mengingat China merupakan negara dengan ekonomi terbesar saat ini. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, pada pertemuan negara-negara G7 di Hiroshima, Jepang, 25 Mei 2023, mengatakan bahwa China merupakan tantangan besar bagi keamanan dan kemakmuran global, terutama dengan pergerakan China yang semakin agresif dan otoriter. Meskipun menganggap China sebagai ancaman, Inggris tetap mengajak negara-negara lainnya yang berada pada pertemuan G7 untuk melakukan pendekatan pada China. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi risiko China bertindak menggunakan paksaan ekonomi untuk mengganggu kedaulatan negara lain⁽¹⁸⁾.

Maka atas dasar ancaman yang ditimbulkan oleh China dianggap mengancam keamanan secara global terutama kawasan Indo-Pasifik,

sehingga negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris merasa perlu untuk mengambil peran dalam meredam pergerakan China melalui AUKUS.

Hingga saat ini AUKUS telah menghasilkan berbagai pengembangan dalam bidang militer seperti kapal selam bertenaga nuklir yang diberikan pada Australia, pengembangan rudal hipersonik di bawah pengawasan *Southern Cross Integrated Flight Research Experiment* (SCiFiRE), dan pengembangan radar *Deep Space Advanced Radar Capability* (DARC) ⁽¹⁹⁾.

Pengembangan kapal selam berteknologi nuklir yang dilakukan oleh AUKUS dengan menandatangani perjanjian *Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement* (ENNPIA) pada 22 November 2021 menciptakan kapal selam yang dapat menyelam lebih lama di dalam lautan dibandingkan dengan kapal selam bertenaga diesel-listrik. Dengan ditandatanganinya ENNPIA, Australia mendapatkan delapan kapal selam bertenaga nuklir pertamanya. Selain pemberian kapal selam untuk Australia, Amerika Serikat juga akan mengembangkan armada militer dengan teknologi yang mutakhir, termasuk dengan reactor Rolls-Royce yang dimiliki oleh Inggris ⁽²⁰⁾. Dalam menampung armada kapal selam nuklir tersebut Australia menghabiskan 10 miliar dolar untuk membangun pangkalan baru. Selain kapal selam bertenaga nuklir, awak kapal selam Australia akan menerima pelatihan dari awak kapal selam Astute milik Inggris yang merupakan salah satu kapal selam terbaik di dunia ⁽²¹⁾.

Selain itu, Melalui kerja sama AUKUS, pengembangan rudal hipersonik dan sistem pertahanan terhadap rudal tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat. Australia dan Amerika Serikat sendiri telah bekerja sama dalam pengembangan rudal hipersonik sejak tahun 2020 melalui penandatanganan perjanjian kolaborasi pengembangan dan uji coba rudal hipersonik di bawah pengawasan

Southern Cross Integrated Flight Research Experiment (SCiFiRE) ⁽¹⁹⁾.

AUKUS juga mengumumkan program pengembangan radar *Deep Space Advanced Radar Capability* (DARC). Program ini memungkinkan radar untuk terus mendeteksi, melacak, serta mengidentifikasi objek di luar angkasa dengan jarak hingga 22.000 mil dari Bumi ⁽²²⁾. Radar ini akan dibangun di Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Radar pertama akan ditempatkan di wilayah Australia Barat dan direncanakan dapat beroperasi mulai tahun 2026, radar yang ditempatkan di Amerika Serikat dan Inggris direncanakan dapat beroperasi secara penuh di tahun 2030 ⁽²³⁾.

Terlibatnya nuklir dalam pengembangan yang dilakukan oleh AUKUS mengakibatkan kekhawatiran dari beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik karena dianggap akan memicu persaingan senjata nuklir di kawasan. Selain itu, pengembangan kapal selam bertenaga nuklir ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip ASEAN dalam *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) yang merupakan komitmen ASEAN untuk mencegah terjadinya perang menggunakan senjata nuklir dengan memastikan negara-negara anggota ASEAN untuk bebas dari senjata nuklir, menghentikan pengembangan senjata nuklir di kawasan, mencegah distribusi senjata nuklir dan tidak mengembangkan teknologi dengan tenaga nuklir ⁽⁵⁾.

4. PEMBAHASAN

4.1 Dukungan Filipina Terhadap AUKUS

Diantara respon negara anggota ASEAN, Filipina merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang menunjukkan dukungannya secara terbuka dibandingkan anggota ASEAN lainnya, Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, memberikan pernyataan bahwa Filipina secara terbuka mendukung pembentukan dari Pakta Pertahanan AUKUS (Asiatoday, 2021). Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan pembentukan AUKUS sangat penting bagi kawasan untuk

mempertahankan stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan ⁽²⁴⁾.

Dukungan Filipina ditunjukkan dengan dirilisnya pernyataan resmi melalui departemen luar negeri Filipina yang menyatakan bahwa Filipina menyambut dengan baik pembentukan AUKUS untuk mencegah krisis yang mungkin terjadi di kawasan Asia Tenggara. Mengingat ASEAN tidak memiliki kekuatan militer untuk menjaga stabilitas keamanan kawasannya serta terdapat ketimpangan antar negara anggota ASEAN terkait power masing-masing negara. Filipina percaya bahwa peningkatan kapabilitas militer melalui AUKUS akan bermanfaat bagi kawasan dalam jangka panjang. Tanpa kehadiran senjata nuklir yang sebenarnya maka AUKUS tidak melanggar perjanjian SEANWFZ. Dinamika kawasan Indo-Pasifik membutuhkan sarana yang tepat dalam merespons perubahan stabilitas militer di Kawasan. Filipina mendukung AUKUS diiringi dengan cita-cita perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran Laut Cina Selatan ⁽²⁵⁾.

Pernyataan resmi dari Filipina terhadap AUKUS dirilis pada 19 September 2021 yaitu empat hari setelah diumumkannya pembentukan AUKUS. Sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN yang mendukung AUKUS secara terbuka, jelas, dan konsisten sejak 2021 hingga saat ini, Filipina bahkan merilis pernyataan resmi sebelum ASEAN menyatakan kesepakatan terkait pembentukan AUKUS. Selain itu pernyataan yang lebih kuat diungkapkan oleh Presiden Duterte pada KTT AS-ASEAN ke-9 pada tanggal 27 Oktober 2021, dalam pidatonya ia menyatakan bahwa dengan terbentuknya AUKUS akan mendorong perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara serta menjamin perdamaian di Kawasan ASEAN dan memastikan keamanan Kawasan yang terus berkembang.

Hal ini menjadi unik dikarenakan sebagian besar negara anggota ASEAN cenderung keberatan dengan keberadaan AUKUS di kawasan . Bagi sebagian besar negara anggota ASEAN, AUKUS telah menyalahi komitmen ASEAN yang terkandung dalam

SEANWFZ. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin memberikan opini melalui media sosial pribadinya terhadap dugaan pelanggaran komitmen ASEAN oleh AUKUS *“Alone in ASEAN the Philippines recognized the merit of AUKUS as iron guarantee of peace in the SCS—precisely by the instability of proliferating great power warships where one mistake will trigger WW3. The prospect of mutual extinction keeps everyone on their best behavior”* (Locsin, 2022). ”

Pernyataan Locsin dalam akun @teddyboylocsin di Sosial Media X pada 12 November 2022, menunjukkan dukungan Filipina terhadap AUKUS sebagai jaminan bagi perdamaian di wilayah Laut Cina Selatan ⁽²⁶⁾. Locsin juga menyangkal mengenai tuduhan dari negara-negara anggota ASEAN bahwa pembentukan pakta pertahanan AUKUS menyalahi perjanjian SEANFWZ serta mengganggu stabilitas keamanan kawasan dengan memprovokasi China. Menurut Locsin pembentukan pakta pertahanan AUKUS ini memberikan dampak sebaliknya dari tuduhan yang diberikan oleh negara anggota ASEAN, Locsin secara terbuka menyatakan bahwa kehadiran AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik dapat memulihkan stabilitas keamanan di kawasan ⁽²⁶⁾. Bentuk lain dukungan Filipina terhadap AUKUS adalah dengan berpartisipasi *Armed Forces of the Philippines* (AFP) sebagai observer dalam pertemuan antara Filipina dan Amerika Serikat pada tahun 2022 yang turut dihadiri oleh pasukan Inggris. Peretemuan tersebut menjadi aksi nyata pertama dari peran AUKUS di kawasan Indo-Pasifik dan aksi nyata dukungan Filipina terhadap AUKUS ⁽¹⁴⁾.

4.2 Alasan Filipina Mendukung AUKUS

Dukungan Filipina terhadap AUKUS disebabkan Filipina meyakini bahwa AUKUS dapat membantu Filipina dalam mengamankan kedaulatannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya China mengklaim 80% wilayah di Laut Cina Selatan termasuk dengan wilayah kedaulatan Filipina. Bantuan dari AUKUS dapat membantu Filipina mengamankan kedaulatannya. Hal tersebut dapat terjadi

dikarenakan AUKUS memiliki program-program pengembangan senjata militer yang maju, seperti kapal selam bertenaga nuklir, rudal hipersonik, dan juga radar bawah laut. Dengan bantuan yang dimiliki AUKUS, Filipina dapat mengamankan kedaulatannya di Laut Cina Selatan.

Kedaulatan wilayah Filipina di Laut Cina Selatan terancam oleh China yang mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan, termasuk wilayah Filipina berdasarkan *nine dash line*. *Nine dash line* sendiri merupakan garis putus-putus yang berdasarkan pada teritorial China secara historis di Laut Cina Selatan. Selain menggunakan *Nine dash line* sebagai alasan untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan, China juga menjalankan upaya militer dalam memperkuat pengaruhnya di Laut Cina Selatan. Upaya militer China dilakukan dengan menyebarkan pesawat kontrol Angkatan udara KJ-500, membuat pangkalan militer di wilayah Laut Cina Selatan, dan mengerahkan kapal Angkatan laut China di Kawasan. Selain menggunakan Upaya militer, China juga menggunakan Upaya non militer melalui taktik abu-abu. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, taktik abu-abu merupakan strategi yang menggunakan sarana non-militer untuk menekan lawan dan memberikan ancaman. Dengan taktik abu-abu China mengerahkan kapal-kapal nelayannya di wilayah Laut Cina Selatan untuk menekan kapal-kapal Filipina ⁽²⁷⁾.

Sementara itu, Filipina telah mengklaim wilayah Laut Cina Selatan termasuk Pulau Spratly dan Pulau Thitu (Britannica, 2024), menggunakan dasar kepemilikan wilayah ZEE dan Landas Kontinen yang terdapat dalam pasal 4 lampiran II *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), yang menyatakan negara yang memiliki Pantai dapat menetapkan batas luar landas kontinennya di luar 200 mil laut sesuai pasal 76 UNCLOS. Negara Pantai tersebut juga wajib menyerahkan keterangan mengenai batas-batas luar landas kontinennya disertai dengan data yang mendukung dalam kurun waktu setidaknya 10

tahun setelah UNCLOS mulai berlaku (UNCLOS, 1982). Berasaskan landasan tersebut Laut Cina Selatan telah menjadi penghasil sumber daya utama bagi Filipina mulai dari minyak bumi hingga gas alam ⁽²⁸⁾.

Sumber daya yang terdapat di Laut Cina Selatan juga menarik perhatian China, oleh karena itu China melakukan berbagai upaya untuk menguasai Laut Cina Selatan. Salah satu upaya China adalah dengan mengklaim wilayah Laut Cina Selatan termasuk wilayah kedaulatan Filipina. China menggunakan alasan *nine dash line* yang berdasarkan pada Sejarah untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dan membangun pulau buatan dengan fasilitas militer. Selain itu China secara sepihak menangkap nelayan Filipina yang melewati batas wilayah yang telah diklaim secara sepihak oleh China ⁽²⁹⁾.

Selain menangkap para nelayan Filipina, China juga mengancam Filipina melalui penggunaan Meriam air yang ditembakkan oleh China ke arah kapal patroli Filipina di Laut Cina Selatan pada 30 April 2021. Berdasarkan keterangan awak kapal patroli Filipina, terdapat sembilan kapal-kapal China yang terus mengikuti kapal-kapal Filipina sejak pukul 4 pagi terdiri dari empat kapal penjaga Pantai, empat kapal milisi maritim China, dan sebuah kapal Angkatan laut China ⁽³⁰⁾.

Tidak hanya menempatkan kapal-kapal untuk membuntuti kapal milik Filipina, Pada tahun 2013 hingga 2015 China juga telah membangun pulau buatan di Laut Cina Selatan. Pulau ini memiliki Luas sebesar 3000 hektar dilengkapi dengan fasilitas militer yang meliputi landasan pacu, Pelabuhan, dan sistem radar. Pembangunan pulau buatan oleh China menjadi perhatian khusus tidak hanya bagi Filipina akan tetapi Kawasan Indo-Pasifik. Pasalnya tidak hanya menimbulkan isu kedaulatan, keamanan dan geopolitik di kawasan, Pembangunan pulau ini juga merusak lingkungan alam di sekitarnya ⁽³¹⁾.

Semakin agresif, di tahun 2020 China melakukan peluncuran rudal Dong

Feng yang dikenal sebagai rudal yang dapat merusak kapal induk. Rudal tersebut diluncurkan ke wilayah kepulauan Paracel⁽³²⁾ yang merupakan salah satu wilayah klaim China terhadap Laut Cina Selatan⁽³³⁾. Peluncuran rudal ini menuai kecaman dikarenakan hal tersebut meningkatkan ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan dan memengaruhi stabilitas keamanan Kawasan Indo-Pasifik⁽³⁴⁾. Peluncuran rudal yang dilakukan China memperkeruh kondisi di wilayah Laut Cina Selatan dan meningkatkan ancaman dari China terhadap Filipina.

Di tahun 2009, Filipina telah berusaha mengamankan kedaulatan wilayahnya di Laut Cina Selatan menggunakan cara non-militer yaitu melalui pengajuan proposal arbitrase. Arbitrase merupakan suatu metode hukum dengan prosedur konsensus dalam menyelesaikan isu sengketa. Memiliki peraturan yang fleksibel, dalam arbitrase para pihak dipersilakan memilih Lokasi tempat peradilan dilakukan, memilih arbitrer sesuai kemampuan negara masing-masing, dan menentukan prosedur yang diterapkan. Filipina memilih metode arbitrase untuk menyelesaikan sengketa China di wilayah Laut Cina Selatan dengan mengajukan proposal arbitrase ke pengadilan arbitrase Internasional namun China menolak berpartisipasi. Menurut China kedaulatan China di wilayah Laut Cina Selatan telah diperoleh sejak lama dan merundingkan kedaulatan yang telah diperoleh sejak lama merupakan hal yang tidak sesuai⁽³⁵⁾.

Dengan gagalnya pengajuan arbitrase oleh Filipina ancaman China terhadap klaim kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Padahal Menurut Pendiri *International Development and Security Cooperation* (IDSC), Chester Cabalza, Filipina memiliki klaim yang sah atas Laut Cina Selatan berdasarkan hukum internasional, bahkan bagi rakyat Filipina sendiri wilayah Laut Cina Selatan yang berada dalam ZEE Manila lebih dikenal sebagai Laut Filipina Barat⁽³⁶⁾. Pulau Thitu yang merupakan rantai dari

pulau Spratly memiliki pangkalan militer dan fasilitas seperti pusat Kesehatan, fasilitas air bersih dan jalur pertanian serta telah ditinggali oleh 300 penduduk Filipina. Oleh karena itu dalam sengketa Laut Cina Selatan, Filipina harus dapat mempertahankan kedaulatan teritorialnya demi warga negaranya yang berada dalam wilayah yang diklaim oleh China.

Dalam upaya mempertahankan kedaulatan negaranya di Laut Cina Selatan, Filipina harus dapat menandingi kekuatan China terutama dalam sektor militer. Dalam perbandingan *Power Index* Filipina mendapatkan perolehan skor 0,4691 dengan peringkat 34 dari 145 negara, sementara China memiliki skor 0,0706 dengan peringkat 3 dari 145 negara⁽³⁷⁾. Dalam *Power Index* perolehan skor 0.0000 merupakan skor sempurna. Maka jika melihat perbandingan *Power Index* antara Filipina dan China, selain dalam hal anggaran militer, Filipina juga memiliki nilai *Power Index* berada jauh di bawah China⁽³⁹⁾.

Selain perbandingan skor yang jauh, apabila dilihat Filipina hanya memiliki keunggulan geografi dibandingkan dengan China. Keunggulan geografi Filipina tentu tidak dapat menutupi kelemahan lain dari Filipina. Sedangkan Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa strategi militer merupakan strategi utama China dalam memenangkan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Untuk dapat menandingi kekuatan militer China, Filipina harus bekerja sama dengan negara lain atau aliansi yang memiliki kekuatan lebih atau setara dengan China, dalam hal ini Filipina memutuskan meminta bantuan dan mendukung AUKUS sebagai bantuan bagi stabilitas Kawasan⁽²⁵⁾.

Filipina menilai ASEAN tidak dapat menghadapi ancaman terhadap kawasan Indo-Pasifik. Filipina menyatakan secara tegas bahwa negara-negara ASEAN baik secara individu maupun kolektif, tidak memiliki kapabilitas militer yang cukup untuk

menjaga stabilitas keamanan kawasan dari ancaman klaim China terhadap Laut Cina Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, pada tanggal 19 September 2021

"There is an imbalance in the forces available to the ASEAN member states, with the main balancer more than half a world away. The enhancement of a near abroad ally's ability to project power should restore and keep the balance rather than destabilize it. Despite advances in military science, time and distance, and the concomitant stopping power of water, remain major constants in determining security capacity to respond appropriately to threats ⁽²⁵⁾".

Penilaian Filipina tidak keliru apabila melihat data Global Fire Power pada tahun 2023, Indonesia merupakan kekuatan militer nomor satu di ASEAN sebagai peringkat 13 jauh di atas negara-negara ASEAN lainnya dengan skor 0,2221 dari 145 negara dengan kekuatan militer yang dipertimbangkan ⁽³⁸⁾. Sementara itu sebagai anggota AUKUS, Amerika Serikat meraih peringkat pertama dengan skor 0,0714, Inggris meraih peringkat 5 dengan skor 0,1435, dan Australia meraih peringkat 16 dengan skor 0,2567 ⁽³⁸⁾. Meskipun peringkat Indonesia mengalahkan peringkat Australia, akan tetapi apabila digabungkan dengan kekuatan Inggris dan Amerika Serikat maka menurut data Global Fire Power tahun 2023 aliansi AUKUS memiliki kekuatan militer yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia.

Filipina sebelumnya telah memiliki kedekatan dengan Australia dan Amerika Serikat sejak sebelum terbentuknya AUKUS. Dukungan Filipina terhadap AUKUS merupakan upaya Filipina untuk mempererat hubungan dengan Australia,

Amerika Serikat, dan Inggris. ⁽³⁹⁾. Berdasarkan sejarahnya, Filipina dan Amerika Serikat memiliki hubungan bilateral yang kuat. Hubungan Filipina dan Amerika Serikat sudah terjalin bahkan sebelum Filipina mendeklarasikan kemerdekaannya.

Amerika

Dimulai dari perang antara Amerika Serikat dan Spanyol, pada saat itu masyarakat Filipina turut berdampingan dengan Amerika Serikat memerangi Spanyol. Tidak hanya mendampingi Amerika Serikat pada perang dengan Spanyol, Filipina juga turut berpartisipasi. Namun hubungan kuat antara Amerika Serikat dan Filipina merenggang saat pemerintahan presiden Rodrigo Duterte. Pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte kebijakan yang dikeluarkan oleh Filipina cenderung mendukung hubungan yang lebih erat terhadap China. Hal ini dipicu oleh ketidaksepakatan antara Filipina dan Amerika Serikat pada saat itu mengenai kebijakan perang melawan Narkoba. Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh presiden Barrack Obama, menentang kebijakan Filipina terhadap pemberantasan Narkoba yaitu dengan membunuh pengedar maupun pengguna Narkoba serta siapapun yang terlibat terhadap penggunaan Narkoba. Pada saat itu Amerika Serikat menilai Filipina telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia melalui kebijakan tersebut ⁽⁴⁰⁾.

Hal ini menimbulkan keretakan hubungan bilateral antara Filipina dengan Amerika Serikat saat itu. Presiden Duterte kemudian melakukan keputusan diplomasi dengan Amerika Serikat dan mempererat hubungan diplomasi dengan China dengan melakukan kunjungan ke China dan membahas mengenai hak penangkapan ikan bagi China di wilayah Laut Cina Selatan. Di akhir masa pemerintahan presiden Duterte, Amerika Serikat mengalami pergantian presiden yang kemudian dimenangi oleh Donald Trump. Setelah masa pemerintahan Rodrigo Duterte berakhir dan digantikan oleh

Ferdinand Marcos Junior, Filipina kembali menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat (26). Kedekatan antara Filipina dengan Amerika Serikat sebelumnya dapat terlihat melalui perjanjian pertahanan *United States of America and Philippines Mutual Defense Treaty* (MDT) yang ditandatangani di Washington pada 30 Agustus 1951 oleh Amerika dan Filipina. Perjanjian ini menekankan komitmen antara Filipina dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Internasional secara damai, baik terpisah maupun Bersama ⁽⁴¹⁾.

Selain itu terdapat pula perjanjian antara Filipina dan Amerika Serikat yang mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan di wilayah kedaulatan Filipina yaitu *Military Base Agreement* (MBA) yang disepakati pada tahun 1947. Berikutnya pada tahun 1947 disepakati *Military Assistance Agreement* (MAA) yang berisi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Filipina terkait transfer peralatan senjata Amerika Serikat pasca Perang Dunia II dan bantuan militer untuk mendukung peningkatan kepolisian Filipina ⁽⁴¹⁾.

Lalu Pada tahun 1998, Filipina dan Amerika Serikat menyepakati perjanjian *Visiting Forces Agreement* (VFA) untuk melakukan kegiatan militer gabungan antara Filipina dan Amerika Serikat. Diantaranya adalah kegiatan *Balikatan, Amphibious Landing Exercise* (PHIBLEX), *The Joint Special Operations Task Force-Philippines* (JSOTF-P), dan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT). Dalam perjanjian ini penempatan pasukan Amerika Serikat di Filipina hanya bersifat sementara dan tidak permanen ⁽⁴¹⁾.

Kedekatan antara Filipina dan Amerika Serikat juga ditunjukkan dalam kerja sama logistik militer dan pengembangan teknologi dan pasukan militer serta pengembangan sistem keamanan maritim yang terdapat dalam perjanjian *Mutual Logistic Support Agreement* (MLSA) dan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA). Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang

telah disepakati antara Filipina dan Amerika Serikat dapat terlihat kedekatan yang begitu kuat antara Filipina dan Amerika Serikat. Sehingga dukungan Filipina terhadap AUKUS juga dapat dikatakan sebagai implementasi Filipina terhadap perjanjian-perjanjian yang telah terbentuk dengan Amerika Serikat.

Australia

Secara geografis wilayah Filipina memiliki jarak yang cukup dekat dengan Australia. Kedekatan Filipina dengan Australia juga dapat terlihat dari persepsi kedua negara terhadap ancaman China. Persepsi yang sama tersebut mempererat hubungan Filipina dan Australia, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengumumkan rencana Australia untuk meningkatkan hubungan dengan Filipina dan menjadikan Filipina sebagai mitra strategis Australia pada 18 Mei 2023 ⁽⁴²⁾. Rencana tersebut bukan tanpa alasan, akan tetapi mengingat Sejarah historis antara Filipina dan Australia. Diantara Filipina dan Australia memiliki tujuan dan kebutuhan untuk mengatasi isu-isu keamanan.

Sejak tahun 2015 Angkatan Laut Filipina dan Angkatan Laut Australia telah terlibat untuk menangani masalah keamanan seperti terorisme dan menjaga keamanan maritim di Laut Cina Selatan. Kerja sama tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Australia dan Filipina dalam *Terms of Reference for Navy-to-Navy Strategy Talks*. Selain itu Australia juga memberi dukungan penuh, saat Filipina mengajukan proposal Arbitrase terkait Sengketa Laut Cina Selatan oleh China kepada Peradilan Hukum Internasional ⁽⁴³⁾. Selain itu pada tahun 2012 Filipina dan Australia menandatangani *Status of Visiting Forces Agreement* (SOVFA). Perjanjian ini berisi arahan kebijakan untuk memantau kerja sama pertahanan dan keamanan seperti pelatihan militer bersama antara Filipina dan Australia ⁽⁴⁴⁾. Hubungan bilateral antara Filipina dan Australia semakin erat Ketika ancaman China semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Bahkan Ketika China melakukan strategi militernya dengan menempatkan lebih dari 200 kapal

penangkap ikan di wilayah ZEE Filipina, Duta besar Australia, Steven J. Robinson, mengeluarkan pernyataan dukungannya terhadap Filipina. Duta besar Australia untuk Filipina, Steven J. Robinson melalui akun media sosial X, @AusAmbPH, pada 10 Desember 2023, menyatakan Australia akan terus mendukung UNCLOS dan hukum Internasional serta mengecam tindakan China terhadap kapal Filipina yang membahayakan. Hal tersebut semakin mempererat hubungan antara Filipina dan Australia. Bergabungnya Australia dengan AUKUS dilihat sebagai Solusi bagi Australia atas kecemasannya terhadap kawasan Indo-Pasifik. Melihat kedekatan hubungan antara Filipina dan Australia maka tidak mengejutkan apabila Filipina mendukung pembentukan AUKUS.

Melihat Sejarah kedekatan antara Filipina dengan negara anggota AUKUS, maka bukan merupakan sebuah kejutan apabila Filipina mendukung pembentukan AUKUS. Meskipun pernah terjadi keretakan hubungan antara Filipina dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Duterte dan Presiden Obama, keretakan tersebut dapat diperbaiki dan presiden Duterte dipenghujung kepemimpinannya kembali menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Dikatakan bahwa Filipina masih sangat membutuhkan bantuan militer dari Amerika Serikat selain itu, berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada antara Filipina dan negara anggota AUKUS, dukungan Filipina terhadap AUKUS dapat dilihat sebagai implementasi Filipina terhadap perjanjian yang telah disepakati.

5. KESIMPULAN

Terdapat tiga faktor pendorong mengapa Filipina mendukung pembentukan pakta pertahanan AUKUS. Pertama, Filipina harus mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Laut Cina Selatan dari ancaman sengketa China. Hal tersebut disebabkan China telah mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan termasuk dengan wilayah kedaulatan Filipina. Kedua, Filipina menganggap ASEAN tidak mampu untuk menjaga stabilitas

keamanan kawasan Indo-Pasifik dalam jangka panjang. Filipina menilai bahwa negara-negara anggota ASEAN baik individu maupun kolektif tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan dari ancaman China terhadap Laut Cina Selatan.

Ketiga, Kedekatan Filipina dengan negara anggota AUKUS di masa lalu juga menjadi salah satu faktor dalam dukungan Filipina terhadap AUKUS. Pada sejarahnya Filipina telah menjadi sekutu bagi Amerika Serikat, Australia, dan Inggris sejak sebelum kemerdekaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Syahrin MN. China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik. *Global & Strategis*. 2018 Juni; 12(1): 145-163.
2. Bendini R. United States-China Relations: A Complex Balance Between Cooperation and Confrontation. Directorate General for External Policies Policy Department, European Union. 2016.
3. Putri N, Molasy HD, Prabhawati A. SIKAP CHINA MENOLAK RESOLUSI PBB UNEP/EA.3/RES.7 TENTANG PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI WILAYAH LAUT. *Skripsi*. Jember; 2019.
4. Brown D. *bbc.com*. [Online].; 2021. Available from: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59752232>.
5. *asean.org*. *asean.org*. [Online]. [cited 2024 Februari 16. Available from: <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/peaceful-secure-and-stable->

6. Noor E. Asia Times. [Online].; 2021 [cited 2023 Oktober 9. Available from: <https://asiatimes.com/2021/11/malaysia-on-the-horns-of-an-aucus-dilemma/>.
7. Walesasi Y, Suharman Y, Mappiare A. Tantangan Strategis Indonesia ditengah Rivalitas Tiongkok versus AUKUS: Sebuah Analisis Dilema Tahanan. Jurnal Hubungan Internasional. 2022 November 29; 15(2): 240-252.
8. Delanova M. DAMPAK PAKTA PERTAHANAN TRILATERAL AUKUS TERHADAP KONDISI REGIONAL INDO-PASIFIK. Jurnal Dinamika Global. 2021 Desember; 6(2): 259-285.
9. Utami S. Keamana Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS dan Implementasinya Pada Ketahanan Wilayah Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional. 2022;; 199-221.
10. Asiatoday. AsiaToday.id. [Online].; 2021. Available from: <https://asiatoday.id/read/filipina-aukus-penting-sebagai-kekuatan-penyeimbang-di-indo-pasifik>.
11. Thabroni G. serupa.id. [Online].; 2022 [cited 2024 Oktober 1. Available from: <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>.
12. Sari DAI, Sunarko BS, Molasy HD. Karakteristik Gender Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di ASEAN. Journal of Feminism and Gender Studies. 2021;; 30-46.
13. Nashir AK, Komeini Y, Rosdiana H. Strategic Environment, Strategist, and Strategy. Global Strategis. 2021 Januari 15; 15(1): 103-126.
14. Heydarian RJ. theinterpreter. [Online].; 2023. Available from: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/philippines-best-friend-aukus-southeast-asia>.
15. Cheema SA. AUKUS: Analysis of its Claimed Objectives in Asia-Pacific. CISS Insight. 2021; IX(2): 86-101.
16. Australian Government Defence. Australian Government Defence. [Online].; 2021 [cited 2024 Mei 10. Available from: <https://www.defence.gov.au/news-events/news/2021-09-17/navy-enters-new-era>.
17. Mercer P. VOA. [Online].; 2022 [cited 2024 Juni 1. Available from: <https://www.voaindonesia.com/a/jajak-pendapat-china-ancaman-militer-bagi-australia/6638068.html>.
18. Erina R. RMOL.ID. [Online].; 2023 [cited 2024 Juni 2. Available from: <https://rmol.id/dunia/read/2023/05/26/575573/pm-inggris-china-memang-ancaman-bagi-dunia>.
19. Royal Australian Air Force. AIR FORCE. [Online].; 2021 [cited 2024 Juni 2. Available from: <https://www.airforce.gov.au/our-work/projects-and-programs/scifire-hypersonics>.
20. Martin A, Safitri DA. ANCAMAN KEAMANAN INDO-PASIFIK TERHADAP KEPUTUSAN AUSTRALIA MEMBANGUN KAPAL SELAM TENAGA NUKLIR TAHUN 2021. In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Politik dan Hubungan

-
- Internasional; 2022; Semarang: SENASPOLHI FISIP UNWAHAS. p. 189-203.
21. Ministry of Defence. GOV.UK. [Online].; 2022 [cited 2024 Juni 2. Available from: <https://www.gov.uk/government/news/australian-submariners-to-join-royal-navy-crews-as-uk-and-australia-deepen-defence-ties-through-aukus-pact>.
 22. Comerford R. BBC. [Online].; 2023 [cited 2024 Juni 2. Available from: <https://www.bbc.com/news/uk-67603379>.
 23. Sevastopulo D, Fisher L. Financial Times. [Online].; 2023 [cited 2024 Juni 2. Available from: <https://www.ft.com/content/42d5bbc4-a9ea-41ae-af38-101def4ce367>.
 24. Choong W, Storey I. Asialink. [Online].; 2021. Available from: <https://asialink.unimelb.edu.au/in sights/southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing,-non-proliferation-and-regional-stability>.
 25. Locsin TL. GOVPH. [Online].; 2021 [cited 2024 Mei 21. Available from: <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/29484-statement-of-foreign-affairs-teodoro-l-locsin-jr-on-the-australia-united-kingdom-united-states-aukus-enhanced-trilateral-security-partnership>.
 26. (@teddyboylocsin) TL. X. [Online].; 2022. Available from: <https://x.com/teddyboylocsin/status/1591393797715689472>.
 27. Heydarian RJ. Why AUKUS Matters to Manila in the Age of Great Power Competition. Quezon.; 2023.
 28. Baylon PBA, Adi OB, Aiko L, Silalahi R, Sitanggang SH, Al Ghifari DN, et al. KAJIAN VALIDITAS KLAIM CHINA ATAS WILAYAH LAUT CINA SELATAN INDONESIA. Jurnal Kewarganegaraan. 2021 Desember; 5(2): 691-700.
 29. Cobus P. Voice of America. [Online]. [cited 2024 Mei 28. Available from: <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>.
 30. Parapat YPP, Susetyorini P, P. DAMPAK KLAIM CHINA DILAUT CINA SELATAN TERHADAP HAK BERDAULAT NEGARA FILIPINA. Undergraduate Thesis. Semarang: Universitas Diponegoro; 2019.
 31. Royandoyan R. Nikkei Asia. [Online].; 2024 [cited 2024 Juni 4. Available from: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/South-China-Sea/Philippines-to-beef-up-defenses-against-South-China-Sea-threats>.
 32. Southerland M. China's Island Building in the South China Sea: Damage to the Marine Environment, Implications, and International Law. Wahington.; 2016.
 1. Mayasari L, Yuniati S, Susilo D. Klaim Filipina atas Kepulauan Kalayaan (Spratly). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. 2013;; 1-7.
 34. CNN Indonesia. CNN Indonesia. [Online].; 2020 [cited 2024 Juni 4. Available from: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200901120007-199-541517/fakta-rudal-china-dong->
-

- [feng-colek-as-di-laut-china-selatan](#).
35. Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. [Online].; 2020 [cited 2024 Juni 4. Available from: <https://setnasasean.id/en/news/read/as-kecam-peluncuran-rudaltiongkok-di-laut-china-selatan>.
 36. Amir F, Yuniati S, Hara AE. Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan(China's Refusal against the Philippine's Arbitration on the Settlement of South China Sea Claims). E-SOSPOL. 2017 Agustus; IV(2): 89-96.
 37. Reyes MT. FORUM. [Online].; 2024 [cited 2024 Mei 28. Available from: <https://ipdefenseforum.com/id/2024/02/filipina-memutakhirkan-pos-pos-terdepan-di-laut-cina-selatan-di-tengah-kekhawatiran-kedaulatan/>.
 38. Globalfirepower. GFP. [Online].; 2024. Available from: <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>.
 39. SIPRI. SIPRI. [Online].; 2023 [cited 2024 Mei 28. Available from: milex.sipri.org/sipri.
 40. Dwi A. tempo.co. [Online].; 2023 [cited 2024 Oktober 1. Available from: <https://dunia.tempo.co/read/1698473/daftar-peringkat-militer-terkuat-di-dunia-2023-indonesia-urutan-ke-13>.
 41. Nindya A, Abiyya R. Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia's Stance]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional. 2022; 13(1): 67-84.
 42. Afif NS. Hubungan Amerika Serikat dan Filipina di Era Pemerintahan Donald Trump. Skripsi. Jember: Universitas Jember, Hubungan Internasional; 2018.
 43. Christina NKS, Priadarsini NWR, Suwecawangsa AP. Analisis Faktor Pendorong Filipina Melanjutkan Kembali Visiting Forces Agreement (VFA) dengan Amerika Serikat Pada Masa Duterte (2020-2021). Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional. 2023 Juli; 3(1): 137-146.
 44. Wong P. Minister for Foreign Affairs Senator the Hon Penny Wong. [Online].; 2023 [cited 2024 Mei 28. Available from: <https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/joint-statement-official-visit-philippines-australian-foreign-minister-penny-wong>.
 45. Maisi OR. Kehadiran Kerjasama Keamanan Trilateral AUKUS bagi Asia Tenggara: Memaknai Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 2023 Juli; 23(2): 1528-1542.
 46. Abke T. FORUM. [Online].; 2019 [cited 2024 Oktober 10. Available from: <https://ipdefenseforum.com/id/2019/05/pasukan-operasi-khusus-menjadi-kunci-untuk-melindungi-kedaulatan-dan-memberikan-ketahanan-di-indo-pasifik-2/>.
 47. Locsin TL. GOVPH. [Online].; 2021 [cited 2024 10 1. Available from: <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/29484->

[statement-of-foreign-affairs-
teodoro-l-locsin-jr-on-the-
australia-united-kingdom-united-
states-aucus-enhanced-
trilateral-security-partnership.](#)